

**ANALISIS KEPENTINGAN POLANDIA TERHADAP UNI EROPA DALAM  
KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas*

**OLEH:**

**AHMAD IRFAN  
1610852012**



**Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Yusra, S.IP. MA**

**Pembimbing 2 : Rifki Dermawan, S.Hum. M.Sc**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Konflik antara Polandia dan Uni Eropa mengenai reformasi peradilan telah menciptakan ketegangan yang serius di antara kedua pihak. UE menuduh Polandia telah melakukan pelanggaran independensi sistem peradilan dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Polandia, di bawah kepemimpinan Partai *Pravo i Sprawiedliwość*, menginisiasi reformasi peradilan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas peradilan. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan, situasi ini masih berada dalam kebuntuan, mencerminkan ketegangan yang rumit antara negara anggota UE dan kedaulatan nasional negara anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan nasional Polandia dalam konflik ini. Dalam pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, konsep kepentingan nasional digunakan sebagai kerangka analisis dengan enam indikator: Tujuan Akhir, Rasionalitas, Sikap Realistik, Penyeimbangan Kekuasaan, Kemoralan Independen Negara, dan Peran Kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Polandia dalam reformasi peradilan merupakan kombinasi kompleks dari pertimbangan domestik dan prioritas politik. Mereka berupaya meningkatkan efisiensi sistem hukum dan memperbaiki akuntabilitas lembaga peradilan. Namun, UE dan kritikus lainnya mengkhawatirkan potensi ancaman terhadap independensi lembaga peradilan oleh pengaruh politik. Situasi ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang keseimbangan antara kedaulatan nasional dan nilai-nilai demokrasi di UE. Dalam konteks ini, Polandia berada dalam tantangan yang signifikan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan UE terhadap supremasi hukum.

**Kata kunci:** Polandia, Uni Eropa, Reformasi, Kepentingan Nasional, Aturan Hukum.



## **ABSTRACT**

*The conflict between Poland and the European Union regarding judicial reforms has created serious tensions between the two parties. The EU accuses Poland of violating the independence of the judicial system and threatening the principles of democracy and the rule of law. Poland, under the leadership of the Law and Justice Party (Prawo i Sprawiedliwość), initiated judicial reforms with the aim of improving the efficiency and accountability of the judiciary. Despite numerous efforts to reach a resolution, the situation remains at an impasse, reflecting the complex tension between EU member states and the national sovereignty of its members. This research aims to identify Poland's national interests in this conflict. Using a qualitative approach and descriptive research, the concept of national interest is employed as an analytical framework, encompassing six indicators: Ultimate Goals, Rationality, Realistic Attitudes, Balance of Power, Independent State Morality, and Leadership Role. The research findings reveal that Poland's national interest in judicial reform is a complex combination of domestic considerations and political priorities. They seek to enhance the efficiency of the legal system and improve the accountability of judicial institutions. However, the EU and other critics express concerns about the potential threats to the independence of the judiciary due to political influence. This situation reflects a broader debate about the balance between national sovereignty and democratic values within the EU. In this context, Poland faces a significant challenge in maintaining a balance between national interests and the European Union's demands for the rule of law.*

**Keywords:** Poland, European Union, NationalInterest, Judicial Reform, Rule of Law.

